



TAHUN 2022

RENCANA AKSI

BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Kinerja tahun 2022 pada unit kerja Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Rencana Aksi Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Rencana Aksi Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.

KEPALA BAPPEDA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011





RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah disusun Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022, yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Berdasarkan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh OPD baik tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota diwajibkan menyusun Rencana Aksi atas Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kerja BAPPEDA tahun 2022 yang telah dijabarkan dalam DPA Murni tahun 2022, BAPPEDA mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 32.731.065.182,-. BAPPEDA melaksanakan 3 Program 15 kegiatan dan 54 sub kegiatan yang diarahkan pada pencapaian 2 Sasaran Utama dan 1 Sasaran Pendukung. Melalui dokumen Rencana Aksi Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 ini, nantinya akan disajikan rencana atau jadwal kegiatan dalam periode satu tahun anggaran dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Bandar Lampung, Februari 2022



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel dan Gambar	iv
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II. Evaluasi Rencana Aksi Tahun Lalu	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu	6
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi BAPPEDA Tahun Lalu	11
BAB III. Rencana Kinerja Tahunan 2022	16
3.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung 2019-2024	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	19
3.3 Rencana Aksi 2022	21
BAB IV. Penutup	22

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Ketercapaian Rencana Aksi dan Realisasi Tahun 2021	12
Tabel 3.1	Tujuan dan Indikator Kinerja	21
Tabel 3.2	Rencana Aksi Atas Kinerja Bappeda Tahun 2022	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	6
Gambar 2.2	Capaian IKU Sasaran 1	7
Gambar 2.3	Capaian IKU Sasaran 2	9
Gambar 2.4	Capaian Kinerja Sasaran Pendukung 2	11
Gambar 3.1	Cascading RPJMD s.d Renstra Bappeda Tahun 2019-2024	20



Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja sebagai pedoman penyusunan Rencana Aksi Tahun 2022.

Sebagai sebuah dokumen PD, Rencana Aksi PD mempunyai kedudukan strategis yaitu memberikan informasi antara perencanaan yang ditargetkan dengan hasil pelaksanaan yang direncanakan pada tahun 2022.

Dokumen Rencana Aksi PD pada unit kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Mencakup dari perencanaan hingga jadwal pelaksanaan dari kegiatan serta anggaran tahun 2022.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 dipedomani oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor



801/143/SEK/VI.01/2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan tolok ukur pencapaian target Sasaran Pembangunan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Memberikan informasi rencana kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung (P Renstra) Tahun 2019-2024 dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022;
2. Menjadi instrumen untuk melaksanakan pengendalian terhadap jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing- masing periode waktu yang telah ditetapkan;
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja capaian sasaran yang diamanatkan dalam Renja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2022 sebagai berikut :



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022, proses penyusunan Rencana Aksi, keterkaitan antara Renja BAPPEDA dengan Program prioritas RKPD dan P Renstra BAPPEDA.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu

Menguraikan pelaksanaan seluruh Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di Bappeda Provinsi Lampung. Mencakup realisasi keuangan, dan juga realisasi kinerja Bappeda selama Tahun 2021.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Bappeda Tahun Lalu

Memuat evaluasi capaian ketepatan pelaksanaan kegiatan pada Bappeda Provinsi Lampung sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen Rencana Aksi.

BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022

3.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung

Memuat Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2019-2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Menjelaskan tujuan dan sasaran BAPPEDA yang mengintegrasikan Visi dan Misi Kepala Daerah.

3.3 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022

Menjelaskan Rencana Aksi Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2022.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan simpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022.



Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu

Pada Tahun 2021 BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 3 program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dalam mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021. Anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp. 31.982.150.950,- yang terbagi dalam sasaran utama 1 sebesar Rp. 2.318.172.400,- dan sasaran utama 2 sebesar Rp. 4.506.882.430,- serta sasaran pendukung sebesar Rp. 25.157.096.120,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 29.252.044.398,-.



Gambar 2.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Dari gambar diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja mencapai 99,49% dengan 45 sub kegiatan yang mencapai 100% dan 4 sub kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 90,29%.



Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 BAPPEDA melaksanakan **3 Program, 13 Kegiatan** dan **49 Sub Kegiatan** dengan total alokasi anggaran sebesar **Rp. 31.982.150.950,-**. Adapun, capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan pada tahun 2021 dirangkum sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	30 %	23,92 %	79,73
↓	↓	↓	↓
1 Program, 3 Kegiatan, 10 Sub Kegiatan	Pagu Program (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.318.172.400	2.139.871.900	92,31

Gambar 2.2 Capaian IKU Sasaran 1

Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2021.

Indikator sasaran 1.b adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 23,92 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 79,73%. Indikator ini diukur berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan Kabupaten/ Kota yang diakomodir dalam RKPD 2022 sebanyak 201 usulan dari 840 total usulan awal.



Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 1 antara lain:

- Usulan belum memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Substansi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan belum selaras dengan sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
- Volume usulan belum disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- Data dukung dari usulan program, kegiatan dan sub kegiatan belum dapat memberikan informasi yang lengkap.

Kedepan, dalam rangka mengoptimalkan peran aktif stakeholder pembangunan kiranya dilakukan sosialisasi tentang mekanisme penyampaian usulan kepada Stakeholder terkait.



Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100 %	100 %	100
Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100 %	100 %	100
Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	85 %	85 %	100
↓	↓	↓	↓
1 Program, 3 Kegiatan, 20 Sub Kegiatan	Pagu Program (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.506.882.430	3.590.267.000	79,66

Gambar 2.3 Capaian IKU Sasaran 2

Indikator sasaran 2.a adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100% dimana indikator sasaran Renstra OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Indikator sasaran 2.b adalah Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100% dimana indikator sasaran Renja OPD telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD. Capaian indikator ini



diukur berdasarkan indikator sasaran Renja OPD sebanyak 1.951 telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD.

Indikator sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 85% atau sebanyak 17 indikator dari 20 indikator yang ditargetkan mencapai 95%. Adapun realisasi nya telah mencapai 100% dimana sebanyak 17 indikator realisasinya telah diatas 95%. Sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2.c sebesar 100%.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sasaran 2 antrara lain:

- Target yang ingin dicapai pada 20 indikator kinerja pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 tidak tercapai dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sebagai bencana di bidang kesehatan yang berdampak pula pada ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keuangan daerah dan capaian target pembangunan daerah.

Untuk menyelesaikan hambatan diatas, maka dilaksanakan tindak lanjut yaitu:

- BAPPEDA dengan didampingi oleh OPD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) sebagai Leading sektor tetap melakukan pendampingan ke OPD dalam penyelerasan indikator Renstra yang bersifat **"SMART"**;

Melakukan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dengan skala prioritas dengan memperhatikan target yang akan dicapai serta menyesuaikan keuangan Daerah.



Sasaran 3 (Pendukung) : Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA			
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Nilai SAKIP	BB	BB	100
↓	↓	↓	↓
1 Program, 7 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan	Pagu Program (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.157.096.120	23.521.905.498	93,50

Gambar 2.4 Capaian Kinerja Sasaran Pendukung 2

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2019 yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerjanya telah mencapai target 100 % karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing OPD pada Bulan Juli Tahun 2021.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi BAPPEDA Tahun Lalu

Untuk capaian evaluasi Rencana Aksi BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 dari 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan yang dilaksanakan terdapat 41 Sub Kegiatan yang sesuai jadwal antara rencana dan realisasinya. Dari 41 Sub Kegiatan tersebut, 4 Sub Kegiatan yang sesuai jadwal namun realisasi tidak 100% dikarenakan tidak sesuai target yang direncanakan. Selanjutnya 8 Kegiatan terlambat dari jadwal yang direncanakan namun tidak mengurangi realisasi kinerjanya hanya saja terlambat dalam tahapan jadwalnya. Keterangan 8 kegiatan yang mengalami keterlambatan tersebut antara lain :



Tabel 2.1 Tingkat Ketercapaian Rencana Aksi dan Realisasi Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Rencana Jadwal (Bulan)	Realisasi (Bulan)
1.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Juli dan Agustus	Mei, Juli, September, Oktober dan November
2.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus dan September	Maret, Juni, Oktober, November
3.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	November	Desember
4.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Oktober	Desember
5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Mei dan November	Desember
6.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Januari, Mei, Juli dan November	April, Juli, Oktober dan Desember
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Maret	April
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Maret	Mei

Berdasarkan pada tabel diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga capaian kinerja dari 8 Sub Kegiatan mengalami keterlambatan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan **“Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota”**, pada sub kegiatan ini terjadi keterlambatan disebabkan adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku di seluruh



wilayah Indonesia. Berdasarkan PPKM tersebut berdampak pada pelaksanaan pembinaan terkait Satu Data Provinsi Lampung yang dilakukan di 15 Kabupaten/ Kota.

Namun keterlambatan tersebut tidak mengurangi capaian kinerja yang tetap 100%, dikarenakan pembinaan dilakukan dengan memperhatikan peta sebaran covid-19 di Kabupaten/ Kota yang akan dilakukan pembinaan, dimana dilaksanakan terhadap Kabupaten/ Kota dengan yang berzona minimal Kuning.

2. Sub Kegiatan “**Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi**”, pada sub kegiatan dilakukan publikasi data pembangunan melalui Website, Update 2 buah Dashboard dan Panel Display, serta Penyusunan Buku Profil Pembangunan. Adapun keterlambatan disebabkan adanya perubahan data-data terkait pembangunan sehingga publikasi mengalami perubahan yang disesuaikan data dukung tersebut. Namun dari sisi capaian kinerja, realisasi nya telah mencapai 100% yang ditandai dengan tercapainya publikasi pembangunan yang melalui 5 media.
3. Sub Kegiatan “**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**”, mengalami keterlambatan dalam penyusunan output nya yang berupa Dokumen Perencanaan terkait Pembangunan bidang Sumberdaya Manusia. Dokumen tersebut sejatinya di susun di Bulan November dan mengalami keterlambatan realisasi di Bulan Desember yang disebabkan data dukung merupakan dasar penyusunan dokumen dimaksud belum sepenuhnya tersedia. Berdasarkan capaian kinerja, sub kegiatan ini tetap dapat memenuhi penyusunan dokumen nya sehingga realisasi nya 100%.
4. Sub Kegiatan “**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**” yang mempunyai output 1 dokumen proceeding FGD Perencanaan



Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dan 1 Dokumen Penyusunan Masterplan Smart School. Dokumen tersebut target penyusunan nya di Bulan Oktober dan mengalami keterlambatan dalam penyusunan nya di Bulan Desember yang disebabkan data dukung merupakan dasar penyusunan dokumen dimaksud belum sepenuhnya tersedia namun hal tersebut tidak menjadi halangan dalam realisasi kinerja sub kegiatan yang telah mencapai 100%.

5. Sub Kegiatan **“Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)”**, yang direncanakan outputnya berupa 1 Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan 1 Buku Peluang Investasi dan Komoditi Unggulan Daerah. Untuk 2 dokumen tersebut mengalami kendala dalam penyusunan nya dikarenakan data pendukungnya melibatkan data dari Kabupaten/ Kota, namun adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku, menjadi halangan dalam berkoordinasi dengan Kabupaten/ Kota. Hal tersebut tidak menjadi halangan dalam pemenuhan dokumen dimaksud dikarenakan koordinasi dapat dilakukan melalui media Virtual Meeting.
6. Sub Kegiatan **“Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian”**, Output nya berupa 1 Dokumen Laporan Monev dan 4 Buku Statistik Perekonomian triwulanan. Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyusunan dokumen tersebut melibatkan stakeholder terkait. Data capaian tersebut dirilis ke publik pada awal tahun (Maret), sedangkan penyusunan dokumen direncanakan di Bulan Januari.
7. Sub Kegiatan **“Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya”**, outputnya berupa pemenuhan pengadaan pakaian dinas (seragam putih) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai



penyediaan pengadaan pakaian. Keterlambatan disebabkan pihak ketiga belum menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yakni Bulan Maret. Namun hal tersebut dapat terpenuhi satu Bulan sesudah jadwal yang ditentukan sehingga capaian kinerja Sub Kegiatan ini 100%.

8. Sub Kegiatan **“Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya”** yang mempunyai output pemenuhan barang-barang kelengkapan kantor seperti Meja Kerja, Kursi, dan Sofa. Keterlambatan disebabkan karena penentuan perencanaan Anggaran Kas yang belum disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Namun hal tersebut tidak mengurangi capaian kinerja secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis diatas, secara keseluruhan permasalahan yang dihadapi tidak sepenuhnya bersifat penting. Hal ini disebabkan walaupun menghadapi masalah, Pejabat Pengawas yang merupakan penanggungjawab dari masing-masing sub kegiatan tersebut dapat mencapai realisasi nya walaupun mengalami kendala dalam pencapaian atau perubahan dalam schedule pemenuhan outputnya. Ini terlihat dari capaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 yang melaksanakan 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan dengan tingkat persentase realisasi kinerja sebesar 99,49% dan tingkat realisasi keuangan sebesar 91,46%.



Bab III. Rencana Aksi 2022

3.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung 2019-2024

Pada periode Renstra 2019 – 2024, mengacu pada Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Visi dan Misi OPD mengikuti Visi dan Misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2015 – 20-19, kemudian dijabarkan dalam Renstra OPD terkait Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program. Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024 yaitu :

“Rakyat Lampung Berjaya”

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya,



produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

- b. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- c. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- d. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, sebagai berikut :

- a. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.



- b. Misi-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
- d. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- e. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- f. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

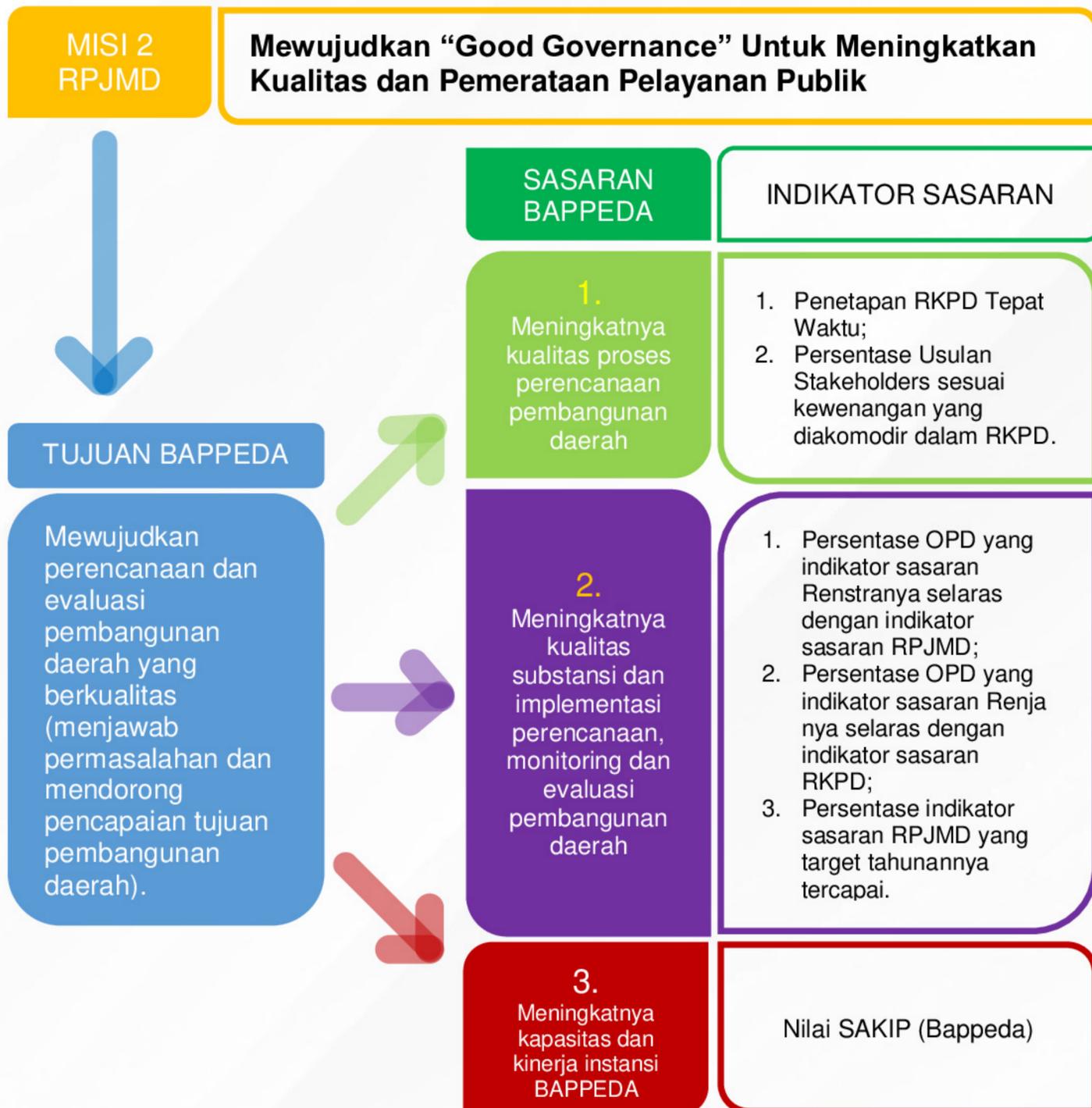
Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Kehidupan Religius dan berbudaya;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi;
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pemerataan);
6. Peningkatan nilai tambah pertanian untuk penanggulangan kemiskinan; dan
7. Pembangunan Berkelanjutan.



3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2019-2024, BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung. Sasaran merupakan penjabaran tujuan. Sasaran harus mempunyai indikator sasaran dengan target yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan.



Gambar 3.1 Cascading RPJMD s/d Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2019-2024, adalah :



Tabel 3.1 Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator kinerja	Target (2024)
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	32%
		Persentase keselarasan indikator sasaran Renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD;	100%
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	95%

Tujuan tersebut selaras dengan misi II RJPMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, dengan Tujuan **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, dan dijabarkan dengan Sasaran **Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi** dengan Indikator kinerja sasaran **Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi**.

3.3 Rencana Aksi 2022

Pada tahun 2022 BAPPEDA Provinsi Lampung mengelola anggaran yang bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 32.731.065.182,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah). BAPPEDA Provinsi Lampung melaksanakan 3 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub kegiatan yang dijabarkan seperti pada lampiran.



Bab IV. Penutup

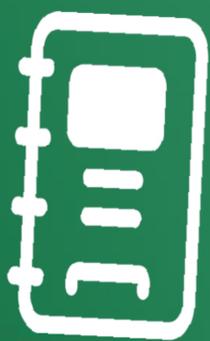
Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 BAPPEDA Provinsi Lampung disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan tahapan (jadwal) pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran dan Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024.

Sejalan dengan hal tersebut, satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan Rencana Aksi adalah kedisiplinan para pelaksana kegiatan terhadap jadwal dan tahapan kegiatan yang telah disusun, serta pengendalian pelaksanaannya oleh pejabat berwenang yang terkait.

Dalam perkembangannya, Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan dinamika dan kebijakan pembangunan daerah, maupun kebijakan keuangan daerah .

Semoga Rencana Aksi Kinerja Provinsi Lampung tahun 2022 dapat bermanfaat dan berkontribusi pada pencapaian Visi Visi Pemerintah Provinsi

Lampung *“Rakyat Lampung Berjaya”*



LAMPIRAN

**RENCANA AKSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

No	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian	PROGRAM	INDIKATOR	Target Capaian	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TARGET	Target Capaian Triwulan	AKSI KEGIATAN	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
SASARAN UTAMA																
1	Meningkatnya Kualitas Proses Perencanaan Pemb. Daerah	Waktu Penetapan RKPD	100%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian data, dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%							
	Persentase usulan stakehoklers sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	100%						Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara konsultasi publik	1 Berita Acara	I	Penyusunan berita acara konsultasi publik	✓			
								Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	II	Penyusunan berita acara Musrenbang Provinsi		✓		
								Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen RKPD (Mumi dan Perubahan)	2 Dokumen	II dan III	Penyusunan dokumen RKPD (Mumi dan Perubahan)		✓	✓	
								Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	100%						
								Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N+1	9 Masukan	I s.d IV	Penginputan data dan informasi serta keterisian E-Database N+1	✓	✓	✓	✓
								Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah Dokumen kajian PNPB Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	75 Orang	I dan II	Banyaknya pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah Dokumen kajian PNPB Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik	✓	✓		
								Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	60 Orang	I dan II	Banyaknya pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota	✓	✓		
								Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)	2 Buku	IV	Penyusunan Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI)				✓
								Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah di OPD dan Kabupaten/Kota	100%						
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring	2 Laporan	I dan IV	Penyusunan Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring	✓			✓		
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Laporan Pelaksanaan Program serta Kegiatan APBD yang dimonitoring dan Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2022	2 Laporan	I dan IV	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Program serta Kegiatan APBD yang dimonitoring dan Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2022	✓			✓		

						Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota	3 Dokumen	II dan IV	Penyusunan Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota		✓	✓	✓
Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	100%						
	Persentase OPD yang indikator sasaran Renja nya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	II	Penyusunan Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan		✓		
	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	100%				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renja nya dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan	10 Perangkat Daerah	IV	Pelaksanaan asistensi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan				✓
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renja nya dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung	10 Perangkat Daerah	II	Pelaksanaan evaluasi Renstra/ Renja Perangkat daerah dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung		✓		
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	IV	Penyusunan Laporan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat				✓
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022	1 Dokumen	III	Penyusunan Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022			✓	

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB	4 Perangkat Daerah	IV	Pelaksanaan evaluasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB					✓
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah	1 Laporan	IV	Penyusunan Dokumen Laporan Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah					✓
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%							
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	IV	Penyusunan Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah					✓
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung	4 Perangkat Daerah	II	Pelaksanaan asistensi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung		✓			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	IV	Pelaksanaan evaluasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur					✓
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	IV	Penyusunan dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					✓
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung	1 Dokumen	IV	Penyusunan Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Keciptakarya Provinsi Lampung					✓
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang diasistensi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	IV	Pelaksanaan asistensi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan					✓
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi Renstra/ Renjanya dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	IV	Pelaksanaan evaluasi Renstra/ Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan					✓

						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung	2 Laporan	IV	Penyusunan Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Dokumen Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung							✓	
SASARAN PENDUKUNG																		
Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tepat waktu	100%										
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan, Renja RB)	11 Dokumen	I s.d IV	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan, Rencana Aksi, PK Murni, PK Perubahan, Renja RB)	✓	✓	✓	✓				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan, Evaluasi Renja RB)	7 Laporan	I s.d IV	Penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (LKj, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan, Evaluasi Renja RB)	✓	✓	✓	✓				
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%										
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	117 Orang	I s.d IV	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	✓	✓	✓	✓				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	2 Laporan	II dan IV	Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD		✓						✓
						Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen kebutuhan barang dan aset yang tepat waktu	100%										
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	II dan IV	Penyusunan laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		✓						✓
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kompetensi ASN Perangkat Daerah	100%										
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	275 Paket	I	Pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	✓							
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang	I	ASN yang mengikuti pelaksanaan bimtek dan sosialisasi	✓							
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi umum perkantoran	100%										
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	I s.d IV	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	✓	✓	✓				
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	I s.d IV	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	✓	✓	✓	✓				
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	I s.d IV	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	✓	✓	✓	✓				
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket	I s.d IV	Penyediaan Bahan/Material	✓	✓	✓	✓				

